BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disingkat dengan Nakertrans Provinsi Sumatera Barat adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Sehubungan dengan terselenggaranya tugas, Nakertrans Provinsi Sumatera Barat juga membuat laporan keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dengan menggunakan aplikasi umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menyediakan data dan informasi pembangunan daerah, serta informasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dan akurat. Laporan keuangan daerah dibuat melalui suatu sistem informasi yaitu SIPD RI.

SIPD RI dirancang oleh Kemendagri dengan tujuan untuk memastikan alur tahapan penyusunan dokumen rencana daerah atau pelaporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD. Pada tahun 2024 sudah mulai diterapkan oleh OPD di Indonesia penggunaan SIPD RI dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Penggunaan SIPD RI juga diperkuat dengan Surat Edaran Sekjend Kemendagri nomor 600.54/48/SJ tentang Implementasi SIPD. Pemerintah daerah diarahkan untuk menyusun perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi pelaporan tahun 2024 melalui SIPD RI.

Kesimpulan yang diperoleh penulis tentang implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

1. Implementasi aplikasi SIPD RI (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia) pada instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat pada proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah pada layanan informasi keuangan daerah di modul akuntansi dan pelaporan keuangan adapun tata cara alurnya adalah sebagai berikut : dimulai dari login ke tampilan awal aplikasi SIPD RI, pilih layanan informasi keuangan daerah, kemudian terdapat tiga modul, modul pertama perencanaan keuangan daerah lalu merencanakan DPA - SKPD dan RAK-SKPD melalui akun pengguna anggaran. Tahap selanjutnya modul kedua penatausahaan keuangan daerah yang dapat diakses oleh bendahara penerimaan dan pengeluaran untuk memposting semua transaksi baik itu untuk UP, GU, TU, SPP, SPM, SP2D, STS yang dilakukan pada modul penatausahaan, selanjutnya tahap proses pelaporan dan keuangan daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat menggunakan modul akuntansi dan pelaporan keuangan daerah menggunakan akun PPK- SKPD.

Langkah pertama, login menggunakan akun PPK, selanjutnya muncul tampilan dashbord PPK-SKPD pada modul akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, selanjutnya menginput transaksi anggaran pada menu transaksi non anggaran, menginput jurnal umum berdasarkan dokumen sumber dari modul penatausahaan,

memposting semua jurnal yang terdapat pada sub menu jurnal anggaran, sub menu pendapatan, sub menu belanja, sub menu pembiayaan, transaksi non anggaran, umum, pembalik dan penutup berdasarkan transaksi yang terjadi pada SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

Maka akan secara otomatis akan muncul pada menu buku jurnal, menu buku besar, dan menu mutasi rekening akan muncul otomatis diakun PPK SKPD setelah diinputkan oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, kemudian kemudian akan tampil menu rekapan buku besar pembantu bank. Pada menu neraca saldo menampilkan saldo awal, terakhir menu laporan keuangan akan muncul sesuai kode rekening berdasarkan format langsung dari aplikasi SIPD RI setelah di posting ke menu jurnal akan otomatis muncul dimenu laporan keuangan per masing-masing sub menu sesuai kode rekening yaitu pada sub menu neraca, sub menu LRA, sub menu LO, sub menu LPE, sub menu Prognosis, dan sub menu LRA Per Program sesuai kegiatan dan sub kegiatan urusan pemerintahan pada SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

2. Dalam implementasi sistem aplikasi SIPD RI, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat mengalami empat hambatan. Pertama, terlambatnya pembayaran gaji pegawai pada bulan Januari tahun 2024 diakibatkan penyesuaian sistem ke SIPD RI. Kedua, kurangnya sarana dan prasarana pendukung terlaksananya implementasi SIPD RI. Ketiga, server pusat yang sering *down* dan jaringan *wifi* yang tidak kuat. Keempat, sering ditemukan kesalahan SPJ pada saat diverifikasi oleh verifikator.

3. Berdasarkan hambatan yang ada dilakukannya upaya oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang pertama mengkomunikasikan langsung dengan pusat untuk pengajuan pembayaran gaji secara manual. Upaya kedua, mengajukan permintaan pengadaan ke bagian aset yang dikelola oleh bagian umum dan kepegawaian untuk dimintai pengadaan komputer ataupun laptop dalam penunjang kelancaran aplikasi SIPD RI. Upaya ketiga, melakukan komunikasi bertahap dari SKPD dan BPKAD Sumbar kemudian ke pihak Kemendagri dengan saran melakukan *refresh* sistem aplikasi SIPD RI secara terus-menerus dalam menangani server yang *down*. Upaya yang keempat, melakukan pengarahannya berupa diskusi dokumen apa saja yang harus diperbaiki.

5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan penulis untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat agar mengoptimalkan implementasi aplikasi SIPD RI terutama dalam hal penunjang terlaksananya kebijakan dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dengan cara melakukan peningkatan anggaran untuk belanja modal pengadaan komputer dan fasilitas lainnya. Kemudian pemerintahan pusat yaitu pihak Kemendagri untuk melakukan *maintenance* aplikasi SIPD RI secara optimal mengingat pengguna aplikasi SIPD RI digunakan oleh seluruh Indonesia baik itu, pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.